

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari seluruh analisis sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pendapatan daerah dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2022 sudah mencapai target dan mencapai kategori, hal ini terlihat tidak ada angka yang melebihi anggaran pendapatan dimana pada 2020 sebesar 95,97%, 2021 sebesar 95,96% dan tahun 2022 sebesar 94,36%.
2. Tingkat efisiensi belanja dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat periode 2020-2022 dinilai belum menghemat anggaran belanja dengan efisien, hal ini terlihat dari adanya angka yang melebihi anggaran belanja, yaitu sebesar 112,32%, 78,31% dan 94,46%. Tingkat rasio yang mencapai kriteria efisien pada tahun 2021 yaitu sebesar 78,31%.
3. Tingkat pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan yang fluktuatif pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan yang cukup berhasil yaitu 55,79%, akan tetapi pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan yang bisa dikatakan cukup drastis yaitu dari 55,79% menjadi 23,29%.

4. Tingkat rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 tergolong kriteria sangat baik yaitu 89,01% sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 tergolong kriteria kurang yaitu tahun 2021 sebesar 14,20% dan tahun 2022 sebesar 15,19% yang berarti kurangnya tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.
5. Tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat Barat terhadap dana transfer pada tahun anggaran 2020-2022 dalam kategori sangat tinggi dengan masing-masing rasio pada tahun 2020 sebesar 84,82%, tahun 2021 sebesar dan tahun 2022 sebesar 79,67% dan 80,02%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana-dan transfer dari pusat masih tinggi yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam melakukan pendanaan pembangunan pada tiga tahun terakhir ini masih harus dibiayai dari dana transfer/pusat.
6. Tingkat pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk tahun 2020-2021 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -51,84% rendah sekali. Hal ini terjadi karena belanja operasi meningkat tetapi belanja modal menurun.
7. Tingkat keserasian belanja operasi dan belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat belanja operasi untuk tahun 2020-2022 mengalami fluktuatif rata-rata masing-masing rasio yaitu sebesar

63,83%, 65,58% dan 52,82% yang mana dapat dikatakan belanja operasi yang dikeluarkan cukup besar untuk mendanai keseharian pemerintahan tiap tahunnya. Sedangkan belanja modal tahun 2020-2022 tergolong dalam kriteria tidak serasi yaitu masing-masing sebesar 15,20%, 14,80% dan 33,01%. Hal ini terjadi karena adanya pengeluaran belanja operasi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja modal.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat harus bisa mempertahankan hasil kinerja mereka terutama dalam hal pengoptimalan pendapatan asli daerah yang mereka dapat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat harus berusaha lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak dengan memaksimalkan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, potensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta mengembangkan potensi-potensi baru yang ada di daerah Kabupaten Manggarai Barat karena ini akan sangat bermanfaat untuk percepatan pembangunan serta menunjang sebagai daerah otonomi yang mampu berdiri dan tidak bergantung pada dana transfer.
3. Sedangkan pada tingkat efisiensi belanja pada pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat disarankan untuk tetap mempertahankan penggunaan anggaran belanja secara hemat sehingga bisa selalu tercapai

target efisien belanja dan tidak bergantung pada belanja transfer dari pemerintah.